|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian | : | Metro Sulawesi | Kasubaud  Sulteng I |
| Hari, tanggal | : | Jum’at, 7 November 2014 |
| Keterangan | : | Kebijakan menaikkan tarif PDAM diprotes warga |
| Entitas | : | Buol |

**Buol, Metrosulawesi.com -** Kebijakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Motanang,  Kabupaten Buol, Sulteng yang menaikkan tarif air  mendapat sorotan  sejumlah warga di daerah itu. Warga menilai belum ada peraturan yang mengatur tentang penetapan tarif secara spesipik.

“Untuk saat ini Perda yang ada baru membahas tentang pelayanan air minum kepada pelanggan yaitu Perda nomor  8 tahun 2005 tentang pelayanan air minum dan Perda  nomor 9 tahun 2005 yang mengatur tarif penetapan air minum tanpa mengatur jumlah atau nilai tarif,” kata Rudi L  warga kelurahan Leok I, Kecamatan Biau kepada wartawan,  (7/11/2014).

Selain itu, juga Perda tersebut harus diperkuat dengan Peraturan  
Bupati (Perbup). Sementara sejak PDAM Buol berdiri belum ada Pemda Buol mengeluarkan Perbup yang mengatur tentang tarif.

Kabag Administrasi Keuangan PDAM Buol, M Anwar Datuamas, ditemui di kantornya Jum’at (7/11/2014) menepis bila pihak PDAM telah menerapkan kebjikan menaikkan tarif air minum, yang ada PDAM hanya sebatas melakukan rasionalisasi pengelompokkan pelanggan.

“Tidak ada kenaikan tarif yang ada kami lakukan adalah rasionalisasi  
pengengelompokkan pelanggan,”kata Anwar.

Dijelaskan Anwar, adapun rasionalisasi pengelompokkan pelanggan yang dimaksud adalah penggolongan tarif berdasarkan tingkat ekonomi pelanggan PDAM sebanyak tujuh golongan. Yakni,  golongan sosial umum, sosial khusus, golongan B1 (masyarakat prasejahtera) yang dilihat dari sisi pendapatan dan bangunannya.

Kemudian, golongan C (ekonomi menengah), golongan atas serta golongan industri. Termasuk pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan dikenakan tarif berbeda.

“Rasionalisasi ini dilakukan berdasarkan temuan kami dilapangan  
rata-rata pelanggan menggunakan tarif golongan prasejahtera. Apa  
rasional kalau kemudian ada pegawai negeri yang menggunakan tarif  
golongan itu,”sebut Anwar.